



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan yang dibuat setiap tahun sebagai tindak lanjut telah ditetapkannya dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan atau biasa disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), penyusunan Renja PD tidak lepas dari peran stakeholder serta pemangku kepentingan dalam penyusunan serta beberapa tahapan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 16 ayat 2 yang dimulai dari tahapan :

- a. persiapan penyusunan.
- b. penyusunan rancangan awal.
  - penyusunan dilakukan paling lambat minggu pertama bulan desember (n-2) dengan berpedoman pada Renstra PD dan Hasil Evaluasi Renja PD tahun lalu.
  - penyempurnaan rancangan awal berpedoman pada Surat Edaran Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Daerah.
- c. penyusunan rancangan.
- d. pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah;
  - dilaksanakan paling lambat 2 minggu setelah Surat Edaran Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- e. perumusan rancangan akhir. dan
- f. penetapan
  - ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan ditetapkan merupakan potret dari Rencana Kerja masing-masing Perangkat Daerah yang telah disampaikan melalui berbagai tahapan dan telah dirumuskan untuk mendukung kebijakan kepala daerah, menampung usulan masyarakat dan stakeholder, selain itu Renja Perangkat Daerah yang disusun juga telah mengakomodir dokumen perencanaan Kementerian / Lembaga sebagai bagian dari kewenangan serta tugas dan tupoksi Perangkat Daerah dan selanjutnya sebagai dasar penyusunan RAPBD.

## 1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah secara normatif memuat dasar hukum sesuai dengan kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi serta sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian / Lembaga terkait :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
- q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025
- r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
- s. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025
- t. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah
- u. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020
- v. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
- w. Peraturan daerah Kota Madiun Nomor 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 tahun 2021
- x. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023
- y. Peraturan Walikota Madiun Nomor Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- z. Peraturan Walikota Madiun Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2024.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah :

1. Memberikan gambaran kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022
2. Memberikan gambaran rencana Perangkat Daerah pada Tahun 2024
3. sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan program, kegiatan, sub kegiatan serta tolok ukur dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah :

1. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Perangkat Daerah yang mengedepankan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan pembangunan
2. Tersedianya dokumen perencanaan sebagai usulan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

### 1.4. Sistematika Penulisan

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai berikut :

Penetapan Renja Oleh Kepala Perangkat Daerah

Daftar Isi

BAB I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
  - 3.3. Program dan Kegiatan
- BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- BAB V : Penutup

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sejauh mana keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan organisasi, selain itu mengidentifikasi faktor penghambat dan mencari solusi dalam pencapaian tujuan organisasi.

Evaluasi Pelaksanaan renja tahun lalu memberikan gambaran atau potret kinerja serta keselarasan dalam mencapai target kinerja perencanaan strategis.

Tabel 2.1.  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2023  
Kota Madiun

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Lampiran : .....

Kode	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) akhir periode	Realisasi Target Kinerja (n-3)/2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Renja (n-1)/2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah (n-2)/2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)/2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun Berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1.05.	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
1.05.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82 Skor	80.97 Skor	81 Skor	85.25 Skor	105%	81.5 Skor	247.22	3.02
1.05.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	3
1.05.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 laporan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	6 laporan	30	5
1.05.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	3
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	13 orang/bulan	100%	100%	100%	100%	13 orang/bulan	213	16,38

*RENJA TAHUN 2024.*

1.05.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	3
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24 laporan	100%	100%	100%	100%	24 laporan	224	9.3
1.05.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100%	100%	-	-	-	100%	200	2
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 unit	100%	-	-	-	1 unit	202	4.04
1.05.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	3
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	100%	100%	100%	100%	12 laporan	212	17.67
1.05.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	3
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 unit	100%	100%	100%	100%	8 unit	300	3
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	100%	100%	100%	100%	-	200	2
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit	100%	100%	100%	100%	5 unit	300	3
<b>1.05.03.</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase Korban Bencana Yang Ditangani</b>	<b>100%</b>	100%	100%	100%	100%	100%	300	3
1.05.03.2.01.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penduduk yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	3

		memperoleh layanan informasi rawan bencana								
1.05.03.2.01.01.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegalisasi	1 dokumen	-	100%	100%	100%	1 dokumen	100	1
1.05.03.2.01.02.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	300 orang	100%	100%	100%	100%	300 orang	500	2
1.05.03.2.02.	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	3
1.05.03.2.02.01.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1	1
	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	400 orang	100%	100%	100%	100%	200 orang	400	1
	Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	5 unit	-	-	-	-	5 unit	5	1
	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	7 kawasan	100%	100%	100%	100%	6 kawasan	300	3
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase dokumen yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	-	200	2
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	37 orang	100%	100%	100%	100%	37 orang	300	3

	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	300 orang	-	-	-	-	300 orang	300	1
1.05.03.2.03.	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	3
1.05.03.2.03.03.	Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	12 orang	-	-	100%	100%	12 orang	300	3
1.05.03.2.03.04.	Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12 orang	100%	100%	100%	100%	12 orang	300	3
1.05.03.2.04.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase tersusunnya sistem dasar penanggulangan bencana	100%	-	-	-	-	100%	100	1
1.05.03.2.04.06.	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1	1

Berdasarkan tabel capaian kinerja renstra diatas terdapat beberapa kondisi yang menggambarkan situasi serta kondisi yang mempengaruhi pencapaian Perangkat Daerah yaitu :

1. Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang *tidak memenuhi target kinerja* yang direncanakan yaitu :
  - a. Program : --
  - b. Kegiatan : --
  - c. Sub Kegiatan : --
  - d. Faktor penghambat : --
2. Realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang *melebihi target kinerja* yang direncanakan :
  - a. Program : Penanggulangan Bencana
  - b. Kegiatan : Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  - c. Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  - d. Faktor pendorong : Adanya pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) yang dilaksanakan oleh BPBD Provinsi di Kota Madiun.
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian renstra perangkat daerah :
  - a. Program yang tidak tercapai / memenuhi target
    - i. Program : Nihil
  - b. Program yang memenuhi atau melebihi target
    - i. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Untuk Program ini realisasi kinerja pada tahun 2022 telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan.
    - ii. Program : Penanggulangan Bencana  
Untuk Program ini realisasi kinerja pada tahun 2022 telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan.
4. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab :
  - a. tidak tercapainya/tidak memenuhi target kinerja  
Untuk realisasi kinerja semua telah tercapai dari target yang ditetapkan.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dengan melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penanggulangan Bencana.

Pelayanan penanggulangan bencana diselenggarakan dengan menggunakan manajemen penanggulangan, yang mencakup layanan sebelum terjadinya suatu bencana, pada saat terjadinya bencana dan layanan pada saat setelah terjadinya suatu kejadian bencana

Tabel 2.2.  
Jenis Pelayanan dan Program Pengampu  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Madiun

No	Jenis Pelayanan	Program	Keterangan
1	Penanganan Bencana Alam (Banjir, Angin Puting Beliung)	Penanggulangan Bencana	Penerima layanan datang ke kantor atau telp kantor BPBD Kota Madiun maupun laporan ke Call Center 112
2	Pembekalan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana		
3	Evakuasi/Penanggulangan Bencana		

Indikator yang menjadi Tolok ukur perangkat daerah yang tertuang dalam renstra perangkat daerah meliputi :

### 1. Indikator Tujuan Perangkat Daerah :

#### a. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana merupakan perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian guna memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap kabupaten/kota.

#### b. Rumus Perhitungan : Indeks Risiko Bencana (Dimana Bahaya dihitung berdasarkan Probabilitas).

## 2. Indikator Sasaran Perangkat Daerah

### a. Penjelasan

➤ Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Indeks Reformasi Birokrasi untuk menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

➤ Persentase kesiapsiagaan masyarakat guna menurunkan korban dan kerugian material akibat bencana

Kesiapsiagaan dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda.

### b. Rumus Perhitungan

➤ Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Indeks Reformasi Birokrasi

➤ Persentase kesiapsiagaan masyarakat guna menurunkan korban dan kerugian material akibat bencana

Jumlah rencana kegiatan kesiapsiagaan masyarakat	X 100%
Jumlah kegiatan kesiapsiagaan masyarakat yang telah dilaksanakan	

## 3. Indikator Program Perangkat Daerah

### a. Penjelasan

➤ Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Nilai Evaluasi SAKIP merupakan Nilai yang didapat Perangkat daerah akan pencapaian akuntabilitas kinerjanya yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan.

➤ Persentase Korban Bencana Yang Ditangani

Korban bencana yang seluruhnya ditangani

### b. Rumus Perhitungan

➤ Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

➤ Persentase Korban Bencana Yang Ditangani

Jumlah korban bencana	X 100%
Jumlah korban bencana yang ditangani	

#### 4. Indikator SPM Perangkat Daerah

##### a. Penjelasan

1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
  - Jumlah warga di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
2. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
  - Jumlah warga di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan.
3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
  - Jumlah warga yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari kejadian bencana.

##### b. Rumus perhitungan

- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	X 100%
Jumlah sasaran yang seharusnya menerima informasi rawan bencana	

- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	X 100%
Jumlah warga negara yang meminta layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	

- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	X 100%
Jumlah warga negara yang meminta layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	

## 5. Indikator LPPD yang di ampu

### a. Penjelasan

- Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
  1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal
    - Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang telah selesai disusun dan dinyatakan sah/legal
  2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana
    - Jumlah warga di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencananya
  
- Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
  1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal
    - Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang telah selesai disusun dan dinyatakan sah/legal
  2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal
    - Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) yang telah selesai disusun dan dinyatakan sah/legal
  3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan
    - Jumlah aparatur dan warga di kawasan rawan bencana yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana
  4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan
    - Jumlah warga di kawasan rawan bencana yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana
  5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana
    - Jumlah warga di kawasan rawan bencana yang mendapat layanan pusdalops
  6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan
    - Jumlah warga di kawasan rawan bencana yang mendapat layanan peralatan perlindungan

- Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
  1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB
    - Respon petugas TRC untuk setiap status KLB kurang dari 24 jam
  2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana
    - Respon petugas TRC untuk setiap status darurat bencana kurang dari 24 jam
  3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana
    - Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana
  4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana
    - Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi

b. Rumus perhitungan

- Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	X 100%
Jumlah sasaran yang seharusnya menerima informasi rawan bencana	

1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal

Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	X 100%
Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan	

2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana

Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	X 100%
Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	

- Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	X 100%
Jumlah warga negara yang meminta layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	

1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal

Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	X 100%
Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan	

2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal

Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	X 100%
Jumlah satu dokumen Renkon yang lengkap dan sudah disahkan	

3. Persentase jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan

Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	X 100%
Jumlah aparatur dan warga negara di kawasan rawan bencana	

4. Persentase warga Negara yang ikut pelatihan

Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	X 100%
Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	

5. Persentase warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana

Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan pusdalops	X 100%
Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	

6. Persentase warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan

Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan peralatan perlindungan	X 100%
Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	

- Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	X 100%
Jumlah warga negara yang meminta layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	

1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB

Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	X 100%
Jumlah seluruh penetapan status KLB	

2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana

Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan status darurat bencana	X 100%
Jumlah seluruh penetapan status Darurat bencana	

3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana

Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	X 100%
Jumlah petugas dalam penanganan darurat bencana	

4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana

Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	X 100%
Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	

Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Madiun

No	Uraian Indikator	Indikator					Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		SPM	Tujuan	Sasaran	Program	LPPD	tahun n-2	tahun n-1	tahun n	tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	√					100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	Tercapai
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	√					100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	Tercapai
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	√					100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	Tercapai
5.	Indeks Risiko Bencana		√				114	113	112	111	121		121	121	

6.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			√			26	26	27	27.5	26.81		27	27.05	Tercapai
7.	Persentase kesiapsiagaan masyarakat guna menurunkan korban dan kerugian material akibat bencana			√			0	0	100%	100%	0		100%	100%	Tercapai
13.	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah			√			80.50	81	81.50	82	85.25		85.30	85.50	Melebihi Target
14.	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani			√			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	Tercapai
15	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				√		845 orang	845 orang	845 orang	845 orang	100%		100%	100%	Tercapai
a.	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan				√		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	Tercapai

	dinyatakan sah/legal														
	a. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana					√	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	Tercapai
16	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					√	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	2395 orang		100%	100%	Tercapai
	a. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal					√	0	100%	100%	100%	0		0	0	Tercapai
	b. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai					√	0	0	100%	100%	0		0	0	Tercapai

	dinyatakan sah/legal														
	c. Persentase jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan					√	5%	5%	5%	5%	67.34%		67.50%	67.50%	Tercapai
	d. Persentase warga Negara yang ikut pelatihan					√	5%	5%	5%	5%	58.67%		58.75%	60%	Tercapai
	e. Persentase warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana					√	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	Tercapai
	f. Persentase warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan					√	0	0	0	0	0		0	0	Tercapai

17	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					√	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	156 orang		100%	100%	Tercapai
	a. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB					√	100%	100%	100%	100%	0		0	0	Tercapai
	b. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana					√	100%	100%	100%	100%	0		0	0	Tercapai
	c. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana					√	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	Tercapai

d. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana						√	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	Tercapai

Dilihat berdasarkan tabel capaian kinerja pelayanan diatas terdapat beberapa kondisi yang menggambarkan situasi serta kondisi yang mempengaruhi pencapaian Perangkat Daerah yaitu :

- Dana kegiatan guna mendukung pelaksanaan kegiatan ;
- Koordinasi dan partisipasi serta kerjasama antar pegawai dan masyarakat.

Tabel 2.4.  
Faktor Penghambat dan Pendorong Kinerja  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Madiun

No	Uraian Indikator	Indikator					Faktor Penghambat atau yang Mempengaruhi	Faktor Pendorong atau Kebijakan yang diambil
		SPM	Tujuan	Sasaran	Program	LPPD		
(1)	(2)	(3)						
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	√					Informasi terkait dengan kebencanaan bukan sesuatu hal yang menarik dan urgent bagi masyarakat	Melaksanakan kegiatan sosialisasi ke masyarakat dan edukasi bencana
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	√					Kesadaran masyarakat yang masih rendah terkait dengan kesiapsiagaan dan pencegahan terhadap bencana	- Melaksanakan pelatihan dan mitigasi bencana kepada masyarakat - Pembentukan Destana (Desa Tangguh Bencana)
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	√					Jumlah bencana yang beragam dan lokasi yang sulit	Pelatihan dan Mitigasi Bencana
5.	Indeks Risiko Bencana		√				- Pemahaman masyarakat tentang risiko bencana - Kondisi / kerusakan lingkungan	- Melakukan sosialisasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana

6.	Persentase penyampaian informasi kebencanaan secara berkala			√			Informasi kebencanaan dianggap kurang menarik dan kurang penting di masyarakat	Melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Bencana
7.	Persentase terlatihnya masyarakat dalam penanganan bencana			√			Masyarakat kurang tertarik dengan pelatihan terkait dengan mitigasi bencana	Mengadakan pelatihan Mitigasi Bencana melalui sekolah – sekolah dan komunitas
8.	Jumlah Destana yang terbentuk			√			Kurangnya pemberdayaan masyarakat di bidang kebencanaan	Pembentukan Destana oleh Pemerintah Kota Madiun
9.	Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana dalam kondisi baik			√			Sarana prasarana yang sudah tua / lama	- Pemeliharaan sarana prasarana yang intensif - Penggantian sarana prasarana dengan yang baru
10.	Persentase korban bencana yang tertangani			√			Jumlah korban yang beragam	Penanganan korban secara tepat dan cepat
11.	Persentase bantuan bencana kepada korban bencana			√			- Jumlah stock yang minim - Kebutuhan bantuan yang beragam	- Penambahan stock bantuan - Pemenuhan bahan bantuan minimal
12.	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah				√		Keterbatasan pemahaman akan SAKIP	Adanya koordinasi dan kerjasama antar pegawai

13.	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani				√		Jumlah korban yang beragam	Penanganan korban secara tepat dan cepat
14.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana					√	Informasi terkait dengan kebencanaan bukan sesuatu hal yang menarik dan urgent bagi masyarakat	Melaksanakan kegiatan sosialisasi ke masyarakat dan edukasi bencana
	a. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal					√	Kurangnya dukungan dan support dari Stakeholder	Menyusun Kajian Risiko Bencana dengan bantuan pihak ke - 3
	b. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana					√	Informasi bencana kurang menarik minat dari masyarakat	Sosialisasi dan edukasi bencana kepada masyarakat
15.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					√	Kesadaran masyarakat yang masih rendah terkait dengan kesiapsiagaan dan pencegahan terhadap bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan pelatihan dan mitigasi bencana kepada masyarakat</li> <li>- Pembentukan Destana (Desa Tangguh Bencana)</li> </ul>

	a. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal					√	Kurangnya dukungan dan support dari Stakeholder	Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana menggunakan bantuan pihak ke-3
	b. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal					√	Kurangnya dukungan dan support dari Stakeholder	Menyusun Rencana Kontijensi menggunakan bantuan pihak ke-3
	c. Persentase jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan					√	Pelatihan dan Mitigasi Bencana yang dilaksanakan dirasa kurang karena keterbatasan anggaran dan waktu	Melaksanakan kegiatan Mitigasi dan pelatihan secara bertahap
	d. Persentase warga Negara yang ikut pelatihan					√	Pelatihan dan Mitigasi Bencana yang dilaksanakan dirasa kurang karena keterbatasan anggaran dan waktu	Melaksanakan kegiatan Mitigasi dan pelatihan secara bertahap
	e. Persentase warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana					√		

	f. Persentase warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan					√	Peralatan Perlindungan yang tersedia sangat terbatas	Pemberian peralatan perlindungan kepada warga yang terdampak secara bertahap
16.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					√	Jumlah bencana yang beragam dan lokasi yang sulit	Pelatihan dan Mitigasi Bencana
	a. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB					√	Penentuan status KLB yang memerlukan koordinasi lintas OPD	Koordinasi dengan OPD terkait dengan Walikota
	b. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana					√	Penentuan status darurat bencana yang memerlukan koordinasi dan penelitian mendalam	Penelitian karakter bencana dan koordinasi dengan OPD terkait dan Walikota serta kesiapan petugas dalam penanganan bencana
	c. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana					√	Pembagian kerja selama 24 jam menjadi 3 shift	Penugasan anggota diluar shift yang masuk dengan Overtime

	d. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana					√	Peralatan pencarian dan evakuasi korban bencana yang minim	Pencarian dan evakuasi korban bencana sampai maximal
--	--	--	--	--	--	---	--	--

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan hasil Indeks Kepuasan masyarakat pada Perangkat Daerah Tahun sebelumnya mendapatkan nilai indeks 3.37 dengan kriteria (Baik Dengan Catatan) dengan unsur nilai 3 (tiga) terendah berada pada unsur :

1. Sarana Prasarana
2. Inovasi
3. Kebijakan Pelayanan

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yaitu :

Tabel 2.5.  
Permasalahan dan Hambatan penyelenggaraan tugas dan fungsi  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Madiun

No	Jenis Pelayanan	Permasalahan	Hambatan
1.	Penanganan Bencana Alam (Banjir, Angin Puting Beliung)	Kejadian bencana yang tersebar di beberapa lokasi	Personil dan peralatan yang kurang
2.	Pembekalan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	Belum semua personil memiliki keterampilan penanggulangan bencana yang mumpuni	Pengadaan pelatihan yang minim
3.	Evakuasi/Penanggulangan Bencana	Evakuasi korban di tempat yang sulit	Peralatan evakuasi yang kurang lengkap

Dampak Permasalahan dan hambatan dalam pencapaian :

1. Visi dan Misi Kepala Daerah  
Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhambat
2. Terhadap Capaian Program Nasional (SPM, SDGs)  
Realisasi penerapan SPM tidak bisa tercapai

Tantangan dan Peluang dalam peningkatan pelayanan Perangkat daerah :

Tabel 2.6.  
Tantangan dan Peluang peningkatan pelayanan  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Madiun

No	Jenis Pelayanan	Tantangan	Peluang
1.	Penanganan Bencana Alam (Banjir, Angin Puting Beliung)	Penanganan bencana yang maksimal	Pengembangan personil penanganan bencana
2.	Pembekalan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	Peningkatan keterampilan dengan belajar sendiri dan dengan rekan/personil lain	Mengadakan pelatihan mandiri
3.	Evakuasi/Penanggulangan Bencana	Penggunaan peralatan yang ada dengan seoptimal mungkin	Melengkapi peralatan evakuasi yang lengkap

Isu Penting serta rekomendasi dan catatan yang strategis dalam menentukan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas :

1. Isu Penting

- a. Bencana adalah tanggung jawab bersama
- b. Koordinasi antar OPD terkait
- c. Pengampu SPM

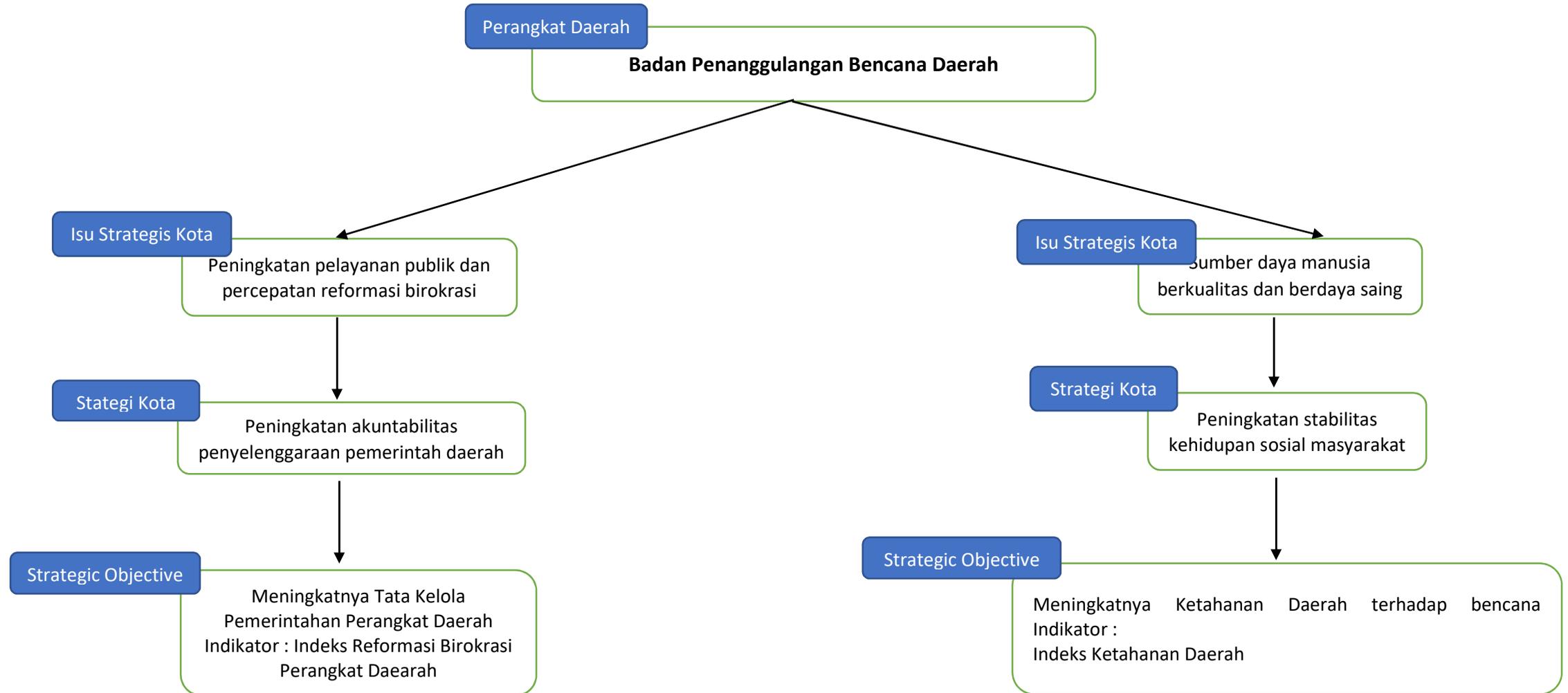
2. Rekomendasi Catatan

- a. Peningkatan koordinasi dengan kenaikan type BPBD dari B ke type A
- b. Pemenuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
- c. Penerapan SPM

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD merupakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang diambil dari Renstra Perangkat daerah pada Tahun Berkenaan. Oleh karena itu perlu dilakukan analisa kebutuhan didasarkan pada evaluasi kinerja Perangkat Daerah, analisa kinerja pelayanan dan identifikasi isu – isu penting yang telah dibagikan dalam bentuk Pohon Kinerja Perangkat Daerah.

Gambar  
Pohon Kinerja



Tabel 2.7.  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024  
Kota Madiun

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program										
A.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BPBD Kota Madiun	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82 Skor	3.114.898.000,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BPBD Kota Madiun	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82 Skor	3.114.898.000,00	
	Kegiatan :										
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	3.525.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	3.525.000,00	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	3.525.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	3.525.000,00	

	Kegiatan :									
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	1.856.427.000,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	1.856.427.000,00
	Sub Kegiatan :									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang/bulan	1.856.427.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang/bulan	1.856.427.000,00
III.	Kegiatan :									
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	200.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	200.000.000,00
	Sub Kegiatan :									
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	200.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	200.000.000,00
IV.	Kegiatan :									
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	100%	17.600.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	100%	17.600.000,00
	Sub Kegiatan :									
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	17.600.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	17.600.000,00
V.	Kegiatan :									
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daera	100 %	485.599.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daera	100 %	485.599.000,00
	Sub Kegiatan :									
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	485.599.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	485.599.000,00
VI.	Kegiatan :									

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100%	551.747.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100%	551.747.000,00	
	Sub Kegiatan :										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	321.347.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	321.347.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	200.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	200.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		30.400.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		30.400.000,00	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	100%	1.846.098.000,00	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	100%	1.846.098.000,00	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	73.985.000,00	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	73.985.000,00	
	Sub Kegiatan :										
1.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di		73.985.000,00	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di		73.985.000,00	

			Kawasan Tempat Tinggalnya					Kawasan Tempat Tinggalnya			
	Kegiatan :										
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	1.494.715.000,00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	1.494.715.000,00	
	Sub Kegiatan :										
1.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		161.175.000,00	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		161.175.000,00	
2.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas		54.045.000,00	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas		54.045.000,00	
3.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		54.441.000,00	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		54.441.000,00	
4.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya		1.066.200.000,00	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya		1.066.200.000,00	
5.	Penyusunan Rencana Kontijensi		Jumlah dokumen Renkon yang dilegalisasi		100.000.000,00	Penyusunan Rencana Kontijensi		Jumlah dokumen Renkon yang dilegalisasi		100.000.000,00	
6.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan		58.854.000,00	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan		58.854.000,00	
	Kegiatan :										
C.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	155.075.000,00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	155.075.000,00	

	Sub Kegiatan :									
1.	Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	12 orang	116.550.000,00	Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	12 orang	116.550.000,00		
2.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12 orang	38.525.000,00	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12 orang	38.525.000,00		
	Kegiatan :									
D.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase tersusunnya sistem dasar penanggulangan bencana	100%	122.323.000,00	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase tersusunnya sistem dasar penanggulangan bencana	100%	122.323.000,00		
	Sub Kegiatan :									
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 dokumen	122.323.000,00	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 dokumen	122.323.000,00		
				<b>4.960.996.000,00</b>				<b>4.960.996.000,00</b>		

Berdasarkan tabel hasil analisis kebutuhan Perangkat Daerah diatas tidak ditemukan perbedaan dengan Rancangan Awal.

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam upaya untuk mengakomodir usulan masyarakat maka diperlukan sumber pendanaan selain APBD Kota Madiun, yaitu APBD Provinsi maupun APBN. Usulan-usulan masyarakat yang akan dibiayai oleh APBD Provinsi dan atau APBN harus disertai data dukung dan telah di verifikasi oleh Perangkat Daerah terkait.

Tabel 2.8.  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024  
Kota Madiun

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/ Volume	Perkiraan Kebutuhan Anggaran	Usulan Sumber Pendanaan (APBD Prov / BK Prov/ APBN / DAK / DBHCHT / Lainnya (sebutkan) )	Penjelasan dikaitkan dengan isu penyelenggaraan sesuai Tupoksi / Isu Strategis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<i>NIHIL</i>							

Catatan : tabel untuk usulan APBD Provinsi maupun APBN

### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

##### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang secara langsung maupun tidak langsung tersangkut dan mendukung arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional meliputi :

- a. penyelenggara penanggulangan bencana di daerah

##### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, diperlukan strategi yang meliputi penetapan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai suatu rencana kinerja yang akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan sumber daya yang tersedia, serta keadaan lingkungan yang dihadapi, dengan kebijakan dan tujuan sebagai berikut.

Dan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dengan dilatihnya masyarakat dalam penanganan / penanggulangan bencana diharapkan masyarakat secara mandiri mampu untuk melakukan penanganan / penanggulangan bencana.

Adapun Tujuan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun adalah *Menurunnya Resiko Bencana Daerah dengan Indikator Indeks Risiko Bencana.*

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi pada pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Sehingga sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yaitu peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana, peningkatan kualitas penanganan bencana, dan peningkatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

##### 3.3. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah merupakan bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang ada di Daerah, sehingga perlu merumuskan apakah Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan mendukung pencapaian diantaranya :

*RENJA TAHUN 2024.*

Tabel 3.1.  
Program dan Kegiatan mendukung pencapaian target  
Kota Madiun

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Visi Misi	SDG's	SPM	Kemiskinan	Faktor Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Program : Penanggulangan Bencana			√		
2.	Kegiatan :					
	<i>a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>			√		
	Sub Kegiatan :					
	1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten / Kota					
	2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)					
	<i>b. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>			√		
	Sub Kegiatan :					
	1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota					

	2. Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota					
	3. Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					
	4. Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan					
	5. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota					
	6. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota					
	7. Penyusunan Rencana Kontijensi					
	8. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					
	<i>c. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana</i>			√		
	Sub Kegiatan :					
	1. Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					

	2. Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					
	d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					√
	Sub Kegiatan :					
	1. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota					

*Catatan :*

Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota untuk penyaluran Dana Bantuan Sosial kepada korban bencana dan penyusunan dokumen penanganan pascabencana kabupaten/kota.

Dari hasil identifikasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang diampu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, maka pada **Tahun 2024** usulan yang diajukan dalam Renja Perangkat Daerah :

1. Jumlah Usulan :
  - a. Program : 2 (dua) Program
  - b. Kegiatan : 10 (sepuluh) Kegiatan
  - c. Sub Kegiatan : 18 (delapan belas) Sub Kegiatan
  - d. Pagu Anggaran : Rp. 4.960.996.000,00
  - e. Sumber Pendanaan :
    - i. APBD : Rp. 4.960.996.000,00
    - ii. APBD PROV : Rp. ....
    - iii. APBN : Rp. ....
    - iv. Lainnya : Rp. ....
  - f. Lokasi Kegiatan : Kota Madiun

Tabel 3.2.  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024  
dan Prakiraan Maju Tahun 2025  
Kota Madiun  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Indikatif	Keterangan
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					
1	5			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>					
1	5	1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
				<b>Kegiatan :</b>					
1	5	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100	%	3.525.000,00	
				<b>Sub Kegiatan :</b>					
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	3.525.000,00	
				<b>Kegiatan :</b>					
1	5	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100	%	1.856.427.000,00	

*RENJA TAHUN 2024.*

					Sub Kegiatan :					
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	Org/bulan	1.856.427.000,00	
					Kegiatan :					
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100	%	200.000.000,00	
					Sub Kegiatan :					
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	laporan	200.000.000,00	
					Kegiatan :					
1	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	100	%	17.600.000,00	
					Sub Kegiatan :					
				10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	unit	17.600.000,00	
					Kegiatan :					
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100	%	485,599,000	
					Sub Kegiatan :					
				3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	laporan	485,599,000	

					Kegiatan :					
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100	%	551.747.000,00	
					Sub Kegiatan :					
				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	unit	321.347.000,00	
				9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	200.000.000,00	
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	30.400.000,00	
					<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>					
					Kegiatan :					
1	5	3	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%	73.985.000,00	
					Sub Kegiatan :					
				2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana	300	orang	73.985.000,00	

						Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya					
						Kegiatan :					
1	5	3	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%	1.494.715.000,00		
						Sub Kegiatan :					
				2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	200	orang	161.175.000,00		
				4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	5	unit	54.045.000,00		
				6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	7	kawasan	54.441.000,00		
				8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	37	orang	1.066.200.000,00		
				9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen Renkon yang dilegalisasi	1	dokumen	100.000.000,00		
				10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	300	orang	58.854.000,00		

					Kegiatan :					
1	5	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%	155.075.000,00	
					Sub Kegiatan :					
				3	Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	12	orang	116.550.000,00	
				4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12	orang	38.525.000,00	
					Kegiatan :					
1	5	3	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase tersusunnya sistem dasar penanggulangan bencana	100	%	122.323.000,00	
					Sub Kegiatan :					
					Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1	dokumen	122.323.000,00	

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Prioritas Pemerintah Daerah pada Tahun 2024 yang harus didukung dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah :

1. Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City
2. Peningkatan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif untuk Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
3. Percepatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Inklusifitas Sosial
4. Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

Tabel 4.1.  
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024  
Kota Madiun  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024						Cata tan Pent ing	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Hasil (Sasaran)	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan (Sasaran)				Tolak Ukur	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	















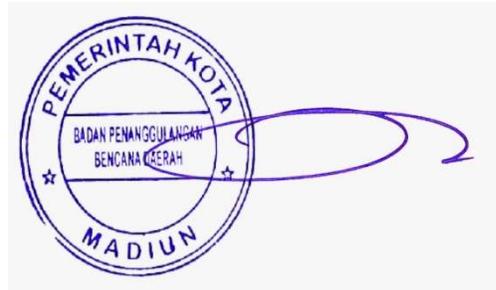
## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun telah dilakukan pembahasan dan analisis kebutuhan dan memperhatikan isu-isu penting terkait pelayanan Perangkat Daerah. Forum Renja Perangkat Daerah juga mengakomodir usulan masyarakat melalui Musyawarah Pembangunan bersama stakeholder terkait, usulan Pokok Pikiran DPRD, usulan Top Down, serta yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah.

Berdasarkan kinerja tahun sebelumnya, arahan prioritas pembangunan dan Rencana Strategis maka Tujuan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2024 adalah terwujudnya kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan sasaran peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana, peningkatan kualitas penanganan bencana, dan peningkatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun disusun sebagai dokumen pendukung dan penyelarasan dokumen perencanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2024.

Madiun, 26 Juli 2023  
KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA MADIUN



**H. WAHYUDI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671106 199003 1 009

*RENJA TAHUN 2024.*

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>						<b>4.960.996.000,00</b>							<b>5.645.000.000,00</b>	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						<b>4.960.996.000,00</b>							<b>5.645.000.000,00</b>	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						<b>4.960.996.000,00</b>							<b>5.645.000.000,00</b>	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah</i>	-			<b>82 Skor</b>	<b>3.114.898.000,00</b>						-	<b>3.455.000.000,00</b>	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah</i>	-			100 %	3.525.000,00			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peni ngkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun	-	5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				6 Laporan	3.525.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peni ngkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun		5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan</i>	-			100 %	1.856.427.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun	-	1.950.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				12 Orang/bulan	1.856.427.000,00	Kota Madiun, Taman, Demangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	(2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun		1.950.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum</i>	-			100 %	200.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun	-	250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	200.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor</i>	-			100 %	17.600.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun	-	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	17.600.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah</i>	-			100 %	485.599.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun	-	550.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	485.599.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun		550.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan</i>	-			100 %	551.747.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan dan Karyawati BPBD Kota Madiun	-	650.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				8 Unit	321.347.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawati BPBD Kota Madiun		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	200.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan dan Karyawan BPBD Kota Madiun		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	30.400.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Berbasis Smart City	Karyawan dan Karyawan BPBD Kota Madiun		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b><i>Persentase Korban Bencana Yang Ditangani</i></b>	-			100 %	1.846.098.000,00						-	2.190.000.000,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</i>	-			100 %	73.985.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun	-	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun</i>				300 Orang	73.985.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<i>Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</i>	-			100 %	1.494.715.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun	-	1.665.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan														
			<i>Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</i>				9 Kawasan	54.441.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun		75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya</i>				37 Orang	1.066.200.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun		1.200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontinjensi														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
			<i>Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan</i>				300 Orang	58.854.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun		75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya</i>				5 Unit	54.045.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun		65.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana</i>				200 Kawasan	161.175.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	<i>Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</i>	-			100 %	155.075.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun	-	225.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana</i>				12 Orang	116.550.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>				12 Orang	38.525.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun		75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	<i>Persentase tersusunnya sistem dasar penanggulangan bencana</i>	-			100 %	122.323.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun	-	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>				1 Dokumen	122.323.000,00	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup (2024) Penguatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Masyarakat Kota Madiun		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
<b>J U M L A H</b>								<b>4.960.996.000,00</b>							<b>5.645.000.000,00</b>	